



RENCANA KERJA (RENJA)



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN ROTE NDAO
T.A. 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan dan penyertaanNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini atas dasar usulan program dan kegiatan dari Sekretariat dan 2 Bidang yang ada pada OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

Usulan program dan kegiatan yang disampaikan telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Rote Ndao

Dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Akhir Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 ini tentunya masih belum sempurna oleh karena itu kami sangat mengharapkan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini.

Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Rencana Kerja (RENJA) Akhir ini, kami ucapkan Terima kasih.

Baa, 17 Juli 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



David D. Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196908111998011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 merupakan pelaksanaan dari Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, yang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, antara lain mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahunan.

Proses penyusunan Renja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Penyusunan Renja Perangkat daerah mengacu pada rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT Tahun 2024 serta Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Provinsi NTT. Renja sebagai suatu dokumen resmi perencanaan tahunan di lingkup Perangkat Daerah tentunya mempunyai peranan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara Rencana Strategis (Renstra) yang berjangka waktu lima tahun dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan. Dokumen Renja Perangkat Daerah juga sebagai input untuk penyusunan RKPD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD kab. Rote Ndao Tahun Anggaran 2024.

1.2 Landasan Hukum

Beberapa produk hukum yang menjadi landasan hukum Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;
21. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
22. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 – 2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005 – 2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 – 2019;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao;
28. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dimaksudkan sebagai penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dan pedoman dalam melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

b. Tujuan

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao adalah :

- a. meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu ;
- b. mengarahkan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao selama 1 (satu) tahun dengan mengacu pada RENSTRA sehingga dapat mencapai sasaran dan target program dan kegiatan yang telah direncanakan;
- c. sebagai tolak ukur penilaian kinerja dalam 1 (satu) tahun pelaksanaan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rote Ndao Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

1.1. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasioal

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Tercapai atau tidaknya pelaksanaan program kegiatan yang telah disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao ini menyajikan gambaran umum dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan selama kurun waktu tahun anggaran 2022.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

Secara organisasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao di bantu oleh (1 (satu) orang sekretaris, 2 (dua) orang Koordinator bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu, 1 (satu) Kasubag, 13 (Tiga Belas) Pejabat Fungsional.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu (2022)

Jumlah pagu dana Belanja pada DPA-OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran 2022 sebesar 2.675.661.629,- yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 10 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan. Dari jumlah pagu dana tersebut terealisasi sebesar Rp.2.624.304.162,- dengan persentasi capaian kinerja keuangan sebesar 98,08 % dengan rincian sebagai berikut:

| NO | PROGRAM / KEGIATAN | ALOKASI ANGGARAN (Rp) | REALISAI ANGGARAN (Rp) | % |
|----|--|-----------------------|------------------------|--------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 2.525.470.580 | 1.844.347.962 | 73,03 |
| | a) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 51.200.000 | | 99,50 |
| | • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 38.200.000 | 38.160.000 | 99,90 |
| | • Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 13.000.000 | 12.975.000 | 99,81 |
| | b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 1.759.556.899 | 1.738.401.733 | 98,80 |

| | | | | |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 1.699.275.899 | 1.678.120.733 | 98,76 |
| | • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 60.281.000 | 60.281.000 | 100 |
| | c) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 |
| | • Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | 4.200.000 | 4.200.000 | 100 |
| | d) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 75.000.000 | 71.250.000 | 95 |
| | • Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 75.000.000 | 71.250.000 | 95 |
| | e) Administrasi Umum Perangkat Daerah | 94.432.000 | 94.431.139 | 99,99 |
| | • Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 500.000 | 500.000 | 100 |
| | • Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.435.000 | 7.435.000 | 100 |
| | • Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 5.700.000 | 5.700.000 | 100 |
| | • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.797.000 | 80.796.139 | 99,99 |
| | f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 27.482.500 | 18.555.194 | 67,52 |
| | • Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.000.000 | 988.000 | 100 |
| | • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 26.482.500 | 17.567.194 | 66,34 |
| | g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 81.137.700 | 29.999.000 | 98,87 |
| | • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 51.138.700 | 49.232.700 | 96,27 |
| | • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan | 29.999.000 | 29.999.000 | 100 |

| | | | | |
|----------|---|--------------------|--------------------|--------------|
| | bangunan Lainnya | | | |
| | | | | |
| 2 | Program Promosi Penanaman Modal | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| | • Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota | 40.000.000 | 40.000.000 | 100 |
| 3 | Program Pelayanan Penanaman Modal | 153.998.530 | 153.998.530 | 99,42 |
| | a) Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 153.998.530 | 121.845.050 | 99,42 |
| | • Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal | 153.998.530 | 152.628.423 | 99,11 |
| 4 | Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 388.654.000 | 373.120.973 | 96,00 |
| | a) Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota | 388.654.000 | 3.394.709 | 96,47 |
| | • Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal | - | - | - |
| | • Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal | 208.214.000 | 200.115.973 | 96,11 |
| | • Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal | 180.440.000 | 173.005.000 | 95,88 |

Pada dasarnya tingkat capaian realisasi kinerja kegiatan dan keuangan untuk 4 program,10 kegiatan dan 19 sub Kegiatan semuanya terealisasi sesuai target dengan kategori sangat berhasil. Hal

ini karena program dan kegiatan yang direncanakan semuanya berjalan tepat waktu. Program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao, seperti pada tabel T-C.29 berikut ini :

Tabel 1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 Kabupaten Rote Ndao

OPD :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

| Kode | | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2022 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2022 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|----|----|------|----|--|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2022 | Realisasi Perangkat Daerah tahun 2022 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 18 | | | | Urusan Wajib Penanaman Modal | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersedianya barang dan jasa kantor | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya perlengkapan kantor | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya profil OPD, Renja,LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi Renja,Revisi Renstra | 7 Dokumen | | | | | 7 Dokumen | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu | 29 Orang | | | | | 29 Orang | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 74 kali | | | | | 74 kali | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya pendataan potensi komoditas | 20 Kali | | | | | 20 Kali | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|---|----------------|--|--|--|--|----------------|--|--|
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | unggulan Tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah yang akurat secara online | 1 Aplikasi | | | | | 1 Aplikasi | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terantau, terbina dan terawasinya kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Rote Ndao | 2 Kali pameran | | | | | 2 Kali pameran | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya kerjasama Investasi | 20 Investor | | | | | 20 Investor | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan pengembangan Investasi Daerah, pemberdayaan UKM dan temu kemitraan | 2 kali | | | | | 2 kali | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | Meningkatnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao | 40 PMA/PMDN | | | | | 40 PMA/PMDN | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Sosialisasi / penyuluhan Pengembangan Investasi Daerah, Pemberdayaan UKM & Temu Kemitraan | 40 Kali | | | | | 40 Kali | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis aplikasi secara online serta peningkatan jaringan untuk aplikasi OSS Versi 1.1 | 2 Aplikasi | | | | | 2 Aplikasi | | |
| | 18 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pendataan potensi komoditas unggulan | 20 Kali | | | | | 20 Kali | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--|--|----------------|--|--|--|--|----------------|--|-------|
| 2 | 18 | | | | Urusan Wajib Penanaman Modal | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersedianya barang dan jasa kantor | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Tersedianya perlengkapan kantor | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 2 | 18 | 02 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersedianya jasa administrasi keuangan | 12 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersusunnya profil OPD, Renja,LPPD, LKPJ, LKIP, Evaluasi Renja,Revisi Renstra | 7 Dokumen | | | | | 7 Dokumen | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu | 29 Orang | | | | | 29 Orang | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah | 74 kali | | | | | 74 kali | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Terlaksananya pendataan potensi komoditas unggulan | 20 Kali | | | | | 20 Kali | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya data dan informasi potensi investasi daerah yang akurat secara online | 1 Aplikasi | | | | | 1 Aplikasi | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.05 | 03 | Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian | Terpantau, terbina dan terawasinya kegiatan Penanaman Modal di Kabupaten Rote Ndao | 2 Kali pameran | | | | | 2 Kali pameran | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Terlaksananya kerjasama Investasi | 20 Investor | | | | | 20 Investor | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terselenggaranya sosialisasi / penyuluhan pengembangan Investasi Daerah, pemberdayaan UKM dan temu kemitraan | 2 kali | | | | | 2 kali | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|---|---|-------------|--|--|--|--|-------------|--|
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | Penyediaan bahan cetakan dan penggandaan | Meningkatnya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao | 40 PMA/PMDN | | | | | 40 PMA/PMDN | |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD | Terselenggaranya Sosialisasi / penyuluhan Pengembangan Investasi Daerah, Pemberdayaan UKM & Temu Kemitraan | 40 Kali | | | | | 40 Kali | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 01 | Penyediaan jasa surat menyurat | Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan berbasis aplikasi secara online serta peningkatan jaringan untuk aplikasi OSS Versi 1.1 | 2 Aplikasi | | | | | 2 Aplikasi | |
| | 18 | 01 | 2.03 | 02 | Penyediaan jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya pendataan potensi komoditas unggulan | 20 Kali | | | | | 20 Kali | |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|----|----|----|---|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 02 | 12 | 01 | 15 | Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan | Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 60 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|----|----|----|---|--|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 2 | 01 | 02 | 24 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 60 Bulan | | | | | 12 Bulan | | 100 % |
| 12 | 01 | 15 | | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | | | | | | | | | |
| 12 | 01 | 15 | 06 | | Terlaksananya koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi di pemerintah dan dunia usaha | 5 Paket | | | | | 1 Paket | | 100 % |
| 12 | 01 | 15 | 08 | | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 10 Kali | | | | | 1 Kali | | 50 % |
| | | | | | Tersedianya Laporan Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | | | | | | | | |

[illegible]

| Kode | | | | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (<i>Outcomes</i>)/ Kegiatan (<i>Output</i>) | Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019 | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d 2017 | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018 | | | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) tahun 2019 | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan | |
|------|----|----|----|---|---|--|---|--|---------------------------------------|-----------------------|---|--|--|
| | | | | | | | | Target Renja Perangkat Daerah tahun 2018 | Realisasi Perangkat Daerah tahun 2018 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=(7/6) | 9 | 10=(5+7+9) | 11=(10/4) |
| 12 | 01 | 17 | 04 | Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi | Tersedianya Petunjuk/ Arahan Tentang Peluang-peluang investasi | 5 Kali | | | | | 1 Kali | | 100 % |
| 12 | 01 | 24 | | Program Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | | | | | | | | | |
| 12 | 02 | 24 | 02 | Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan | Terlaksananya Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan | 5.096 Ijin | | | | | 1.200 | | 109.07 % |

Berdasarkan data Tabel 2.1, target dan realisasi indicator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun 2022 dan target renja sampai dengan tahun 2022, dengan tingkat capaian yang bervariasi. Ada yang mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2018, dan ada beberapa yang belum mencapai target yang telah ditetapkan. Sedangkan target capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao sampai dengan tahun ke empat pelaksanaan renstra tahun 2015 – 2019, ada beberapa kinerja yang belum mencapai target.

Adapun beberapa hal yang menyebabkan belum tercapainya target kinerja antara lain :

1. Kurangnya perangkat kerja seperti laptop, hardisk dan printer sehingga diharapkan tersedianya perangkat kerja untuk kelancaran pekerjaan;
2. Kurangnya studi banding, magang dan bimtek bagi pelaku usaha dan ASN Pengelola sehingga diharapkan adanya studi banding dan magang agar lebih memahami prosedur Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu
3. Kurangnya penganggaran untuk mempersiapkan data potensi unggulan daerah dan pameran ke luar daerah sehingga dibutuhkan anggaran agar dapat tersedianya data potensi unggulan dan terselenggaranya pameran di luar daerah;
4. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung investasi;
5. Keterbatasan tingkat keamanan bagi usaha investasi sehingga perlu ditingkatkan.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, diharapkan ke depan akan dilakukan perbaikan melalui peningkatan keterampilan SDM ASN pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao melalui Studi banding, magang dan bimtek. Dibutuhkan adanya penambahan anggaran demi terselenggaranya beberapa kegiatan secara optimal dan perlu adanya peningkatan keamanan berusaha bagi investor.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi teknis yang menangani masalah Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati Rote Ndao. Pelayanan Perizinan yang mudah, cepat, transparan dan menjamin adanya kepastian waktu serta kepastian biaya merupakan perombakan system, pengembangan SDM dan pemanfaatan teknologi maju maka pelayanan perizinan dapat dilaksanakan dengan sangat efektif dan efisien serta menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

Dari sisi waktu, masyarakat bisa mengontrol atau memonitor status perizinan sampai dimana melalui tanda terima berkas yang diterima oleh pemohon saat berkas dinyatakan lengkap, sehingga pemohon dapat mengecek lewat telepon Dinas Dari sisi akuntabilitas keuangan, Biaya Retribusi Perijinan langsung disetor Ke rekening Kas Daerah kabupaten Rote Ndao berdasarkan standar biaya yang telah tercantum dalam Standar Operasional prosedur (SOP).

Secara kumulatif jumlah perizinan yang diterbitkan/dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Rote Ndao sejak penggabungan tahun 2016 sampai pada akhir bulan Desember tahun 2022

berjumlah **6.213** perizinan dan non perizinan. Sementara perkembangan realisasi investasi PMA/PMDN tahun 2014-2022 berjumlah **74**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao dalam menganalisis kinerja pelayanan PD mengacu pada IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 1).Tugas dan fungsi masing-masing PD, 2).Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Kinerja pelayanan SKPD mendeskripsikan perbandingan antara target dan realisasi pencapaian berbagai indicator kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir (2014-2019) sebagaimana ditetapkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao

| NO | Indikator | SPM/Standar Nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah | | | | Realisasi Capaian | | Proyeksi | | Catatan Analisis |
|----|--|----------------------|-----|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| | | | | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Indeks Kepuasan Pelayanan Publik | | | | 79 | 80 | 85 | 85,30 | 90,21 | | 90,21 | |
| 2 | Meningkatnya Investasi Berskala Nasional | | | | 66 | 70 | 75 | 60 | 74 | | 74 | |
| 2 | Jumlah Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | | | | 160.000.000.000 | 165.000.000.000 | 170.000.000.000 | 493.030.235.000 | 788.394.339.000 | 493.030.235.000 | 788.394.339.000 | |
| 3 | Realisasi Investasi PMDN/PMA | | | | 100.000.000.000 | 100.000.000.000 | 105.000.000.000 | 119.446.795.389 | 64.423.980.161 | 119.446.795.389 | 64.423.901.61 | |
| 4 | Persentase bangunan/usaha Berijin | | | | 60% | 70% | 80% | 69,52% | 104% | 69,52% | 104% | |

2.1. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DPMPTSP

Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kabupaten, hasil telaah terhadap rencana tataruang wilayah dan hasil analisis kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang;

a. Tantangan

- Sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan DPMPTSP masih belum memadai, menjadikan ruang gerak yang terbatas untuk mengoptimalkan kuantitas dan kualitas pelayanannya kepada masyarakat khususnya kepala pelaku usaha yang berinvestasi di Kabupaten Rote Ndao
- Kurang adanya regulasi yang menunjang pelayanan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Belum adanya kesadaran dari pemilik usaha untuk mengurus izin usaha
- Sumber Daya Informasi masih sangat terbatas terutama mengenai Sistem informasi yang berbasis teknologi.
- Kualitas sumber daya aparatur DPMPTSP perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal, mengikuti semakin tingginya tuntutan masyarakat akan pelayanan perijinan yang mudah, cepat dan pasti

b. Peluang

- Berkoordinasi dengan OPD Teknis untuk merancang Peraturan Daerah yang terkait dengan Pelayanan Perijinan
- Adanya program pelayanan langsung ke Desa/Kelurahan
- Perkembangan Teknologi yang semakin pesat
- Perlu adanya penambahan SDM yang berkualitas dan mau bekerja profesional
- Perlu adanya BIMTEK/DIKLAT yang terkait dengan regulasi maupun pelayanan perizinan secara terus menerus
- Perlu adanya Peraturan Bupati yang terkait dengan fungsi dan kedudukan Tim Teknis OPD dan Satuan Tugas dari Instansi terkait
- Potensi Usaha yang cukup beragam
- Minat Investor cukup optimis untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Rote Ndao.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Rote Ndao antara lain :

Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Rote Ndao sebagai instansi teknis yang menangani urusan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu senantiasa berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dengan memanfaatkan berbagai sumber

dana dan sumber daya yang ada serta selalu berusaha melaksanakan tugas pelayanan pemerintahan seoptimal mungkin.

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja sasaran pelaksanaan program/kegiatan dan capaian target kinerja selama tahun 2022, maka beberapa isu penting yang dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Perubahan Regulasi :

- Peraturan berkaitan dengan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu setiap waktu terus berubah untuk menjawab berbagai tuntutan kebutuhan masyarakat akan peningkatan kualitas pelayanan serta perkembangan dunia dan kebijakan nasional ;
- Kurang adanya sosialisasi tentang berbagai peraturan perundang-undangan;
- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya kegiatan investasi di daerah, serta terbatasnya kemampuan aparatur dan pemilik modal berkaitan dengan regulasi yang ada;
- Belum berfungsi secara optimalnya Tugas Satgas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Tingkat Kabupaten Rote Ndao untuk memfasilitasi berbagai permasalahan dan hambatan investasi.

b. Perencanaan yang Belum Matang :

- Belum terintegrasinya sistem koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu ;
- Masih belum sinkronnya berbagai dokumen perencanaan;
- Perencanaan Kebutuhan Aset Daerah yang belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif;

c. Sumber Daya Manusia :

- Masih kurangnya pemahaman tentang penting investasi di daerah;
- Masih terbatasnya SDM aparatur di bidang Informasi dan Teknologi (IT);
- Masih terbatasnya SDM aparatur yang menguasai sistem aplikasi pelayanan perizinan;
- Masih kurang motivasi kerja aparatur sesuai sasaran kerja pegawai.

d. Belum Akuratnya Data, Informasi dan Pelaporan :

- Belum maksimalnya data potensi investasi Online;
- Masih sering terlambatnya penyampaian laporan LKPM dari para investor;
- Kapasitas internet yang belum memadai untuk menunjang pelayanan perizinan secara online ;
- Belum maksimalnya sistem pelaporan realisasi program/kegiatan, keuangan dan laporan kinerja.

e. Sarana dan Prasarana :

- Kurangnya sarana dan prasarana fasilitas penunjang penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan PTSP.
- Belum optimal pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *Online Single Submission* (OSS)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dokumen Rencana Kerja pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar program dan Kegiatan seluruh OPD dengan prediksi Pagu Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA OPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD, perlu dilakukan review terhadap rancangan awal tersebut untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD.

Dalam rancangan awal RKPD terdapat 4 program yang tercantum dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP, yaitu :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan
- 2) Program Peningkatan Promosi Penanaman Modal
- 3) Program Pelayanan Penanaman Modal
- 4) Program pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Rote Ndao serta tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP maka pada tahun 2024 program dan kegiatan yang direncanakan tidak jauh berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun 2023 hanya dilakukan penyesuaian program yang namanya berbeda.

Pada tahun 2022 telah direncanakan 4 program dengan 10 kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja kegiatan sebesar Rp. 2.675.661.629,-. Dana tersebut kesemuanya berasal dari APBD. Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 dapat dilihat pada table T.C-31 berikut :

2.3. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022

Tabel 3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022
Kabupaten Rote Ndao

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|---------|--|----------------|--------------------------|--|---------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.x000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintah | | | | | |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMPTSP | Tersedianya Materai dan Perangko untuk keperluan kantor | 12 bulan | 2.375 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | DPMPTSP | Tersedianya Materai dan Perangko untuk keperluan kantor | 12 bulan | 2.375 | |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik | DPMPTSP | Tersedianya Pembayaran rekening listrik, air dan telepon | 12 bulan | 27.000 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air,dan Listrik | DPMPTSP | Tersedianya Pembayaran rekening listrik, air dan telepon | 12 bulan | 27.000 | |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | DPMPTSP | Pembayaran pajak kendaraan dinas | 6 unit | 2.600 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional | DPMPTSP | Pembayaran pajak kendaraan dinas | 6 unit | 2.600 | |
| | Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan dan Perkantoran | DPMPTSP | Pembayaran Honor pengelola APBD | 12 bulan | 68.000 | Penyediaan Jasa Administarsi Keuangan | DPMPTSP | Pembayaran Honor pengelola APBD | 12 bulan | 68.000 | |
| | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | DPMPTSP | Tersedinya kebutuhan kebersihan kantor | 12 bulan | 2.200 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | DPMPTSP | Tersedinya kebutuhan kebersihan kantor | 12 bulan | 2.200 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|--|-----------------------|---|----------------|--------------------------|--|---------|---|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.x000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | DPMPTSP | Tersedianya jasa service computer/laptop dan printer | 5 unit | 2.200 | Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja | DPMPTSP | Tersedianya jasa service computer/laptop dan printer | 5 unit | 2.200 | |
| | Penyediaan Alat Tulis Kantor | DPMPTSP | Pengadaan alat tulis untuk keperluan kantor | 12 bulan | 22.000 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | DPMPTSP | Pengadaan alat tulis untuk keperluan kantor | 12 bulan | 22.000 | |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DPMPTSP | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 16.500 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | DPMPTSP | Tersedianya barang cetakan dan penggandaan | 12 bulan | 16.500 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | DPMPTSP | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 2.200 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor | DPMPTSP | Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | 12 bulan | 2.200 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPMPTSP | Tersedianya laptop dan Printer kantor | 5 unit | 33.000 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | DPMPTSP | Tersedianya laptop dan Printer kantor | 5 unit | 33.000 | |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | DPMPTSP | Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 bulan | 3.000 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | DPMPTSP | Pengadaan bahan bacaan dan perundang-undangan | 12 bulan | 3.000 | |
| | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah | Dalam dan Luar Daerah | Tersedianya kesempatan mengikuti rakor dan konsultasi diluar daerah | 35 Kali | 332.365 | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | DPMPTSP | Tersedianya kesempatan mengikuti rakor dan konsultasi diluar daerah | 35 Kali | 332.365 | |
| | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | DPMPTSP | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 1 Unit | 21.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | DPMPTSP | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 1 Unit | 21.000 | |
| | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | DPMPTSP | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 1 Unit | 10.000 | Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | DPMPTSP | Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional | 1 Unit | 10.000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|--|----------|-----------|---|-------------|--|----------|-----------|--|
| | Pembangunan Gedung pelayanan perijinan dan non perijinan | DPMPTSP | Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan perijinan dan non perijinan | 1 Unit | 1.500.000 | Pembangunan Gedung pelayanan perijinan dan non perijinan | DPMPTSP | Terlaksananya pembangunan gedung pelayanan perijinan dan non perijinan | 1 paket | 1.500.000 | |
| | Pengadaan pakaian dinas/ kerja/ olahraga/ motif daerah khusus hari-hari tertentu | DPMPTSP | Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu | 29 Orang | 16.313 | Pengadaan pakaian dinas/ kerja/ olahraga/ motif daerah khusus hari-hari tertentu | DPMPTSP | Tersedianya pakaian motif daerah khusus hari-hari tertentu | 29 Orang | 16.313 | |
| | Peningkatan pengetahuan dan keterampilan SDM Aparatur | Luar Daerah | Terlaksananya Bimtek Online Single Submission (OSS), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Keuangan dan Laporan Kinerja | 6 Orang | 75.000 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Luar daerah | Terlaksananya Bimtek Online Single Submission (OSS), Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), Keuangan dan Laporan Kinerja | 1 paket | 75.000 | |
| | Pembuatan Profil Organisasi Perangkat Daerah | DPMPTSP | Tersusunnya Profil OPD | 35 Buku | 10.000 | Pembuatan Profil Organisasi Perangkat Daerah | DPMPTSP | Tersusunnya Profil OPD | 35 Buku | 10.000 | |
| | Program Peningkatan Promosi, Pengendalian dan kerjasama investasi | | | | | Program Peningkatan Promosi, Pengendalian dan kerjasama investasi | | | | | |
| | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha | Kab.RN dan Prov.NTT | Terlaksanya kerjasama investasi antara pemerintah Kab. Rote Ndao dengan Kab/Kota se-daratan Timor | 40 Kali | 55.000 | Peningkatan koordinasi dan kerjasama di Bidang Penanaman Modal dengan Instansi Pemerintah dan Dunia Usaha | 40 Kali | Terlaksanya kerjasama investasi antara pemerintah Kab. Rote Ndao dengan Kab/Kota se-daratan Timor | 40 kali | 55.000 | |

| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
|----|---|------------------------------|--|----------------|--------------------------|---|------------------------------|--|----------------|-------------------------|-----------------|
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif (Rp.x000) | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Kebutuhan Dana (Rp.000) | |
| | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Kab.RN dan Prov.NTT | Terlaksanya Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 40 PMA/PMDN | 50.000 | Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | Kab.RN dan Prov.NTT | Terlaksanya Pemantauan, Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal | 40 PMA/PM DN | 50.000 | |
| | Penyelenggaraan Pameran Investasi | Kupang dan luar propinsi | Terlaksananya kegiatan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi | 2 kali | 70.000 | Penyelenggaraan Pameran Investasi | Kupang dan luar propinsi | Terlaksananya kegiatan promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi | 2 kali | 70.000 | |
| | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab. Rote Ndao | DPMPTSP | Tersedianya panduan pengembangan penanaman modal di Kab. Rote Ndao | 1 dokumen | 400.000 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Kab. Rote Ndao | DPMPTSP | Tersedianya panduan pengembangan penanaman modal di Kab. Rote Ndao | 1 dokumen | 400.000 | |
| | Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | Kab. Rote Ndao | Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | 3 Kali | 60.000 | Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | Kab. Rote Ndao | Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi | 3 Kali | 60.000 | |
| | Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal | Kab. Rote Ndao dan Prop. NTT | Tersedianya pengembangan system informasi penanaman modal | 2 Kali | 50.000 | Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal | Kab. Rote Ndao dan Prop. NTT | Tersedianya pengembangan system informasi penanaman modal | 2 Kali | 50.000 | |
| | Sosialisasi/Penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu Kemitraan | Kab.RN dan Prop. NTT | Terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu kemitraan | 4 Kali | 120.000 | Sosialisasi/Penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu Kemitraan | Kab.RN dan Prop. NTT | Terselenggaranya sosialisasi/penyuluhan pengembangan investasi daerah, pemberdayaan UKM dan Temu kemitraan | 4 Kali | 120.000 | |
| No | Rancangan Awal RKPD | | | | | Hasil Analisis Kebutuhan | | | | | Catatan Penting |
| | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target Capaian | Pagu indikatif | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Target | Kebutuhan Dana | |

| | | | | n | (Rp.x000) | | | | Capaian | (Rp.000) | |
|--|---|-------------------|---|------------|-----------|---|-------------------|---|------------|----------|--|
| | Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi | Kab.RN dan Kupang | Terlaksananya pendataan dan kajian potensi unggulan daerah | 2 Kali | 50.000 | Pendataan potensi unggulan berpeluang investasi | Kab.RN dan Kupang | Terlaksananya pendataan dan kajian potensi unggulan daerah | 2 Kali | 50.000 | |
| | Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan | DPMPTSP | Terlaksanya Aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) | 2 Aplikasi | 95.000 | Peningkatan Pengelolaan Pelayanan Perijinan | DPMPTSP | Terlaksanya Aplikasi SPIPISE (Sistem Pelayanan Informasi dan Perijinan Investasi Secara Elektronik) | 2 Aplikasi | 95.000 | |
| | Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan | Kab.RN | Terlaksananya Pendataan Perizinan dan Non Perizinan | 1349 Ijin | 200.000 | Pendataan dan Penertiban Perizinan dan Non Perizinan | Kab.RN | Terlaksananya Pendataan Perizinan dan Non Perizinan | 1349 Ijin | 200.000 | |
| | Fasilitasi Satuan Tugas Kabupaten Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | Kab. RN | Terlaksanya Fasilitasi Satuan Tugas Kab. Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 6 Kali | 150.000 | Fasilitasi Satuan Tugas Kabupaten Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 10 Kecamatan | Terlaksanya Fasilitasi Satuan Tugas Kab. Percepatan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 6 Kali | 150.000 | |

2.4. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rancangan awal RKPD merupakan kerangka pendahuluan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang berhasil dihimpun dari masyarakat, stakeholder dan pemerintah sendiri. Rancangan Awal RKPD merupakan kunci penting dalam menentukan kualitas seluruh proses penyusunan RKPD. Rancangan Awal menginformasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, arah prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja program dan kegiatan yang dilengkapi dengan rancangan pagu indikatif untuk setiap Perangkat Daerah untuk tahun yang direncanakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyiapkan rancangan Renja.

Perangkat Daerah Rancangan Awal RKPD berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan inidikatif untuk tahun yang direncanakan. Berdasarkan Rancangan awal yang dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dapat diketahui bahwa kegiatan pada tahun 2022 sesuai dengan lampiran 4 evaluasi rancangan awal RKPD. Rancangan awal RKPD dibuat dengan melalui proses *bottom up* melalui mekanisme musrenbang yang disesuaikan dengan hasil Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao, kemudian dilakukan analisis kebutuhan berdasarkan kondisi tahun yang sebelumnya dan prediksi tahun yang akan datang dengan tujuan bahwa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan target. Berdasarkan hasil musrenbang maka tidak usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2022 seperti terlihat pada lampiran Tabel 4.

Tabel 4

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/ Volume | Catatan |
|----|------------------|--------|-------------------|--------------------|---------|
| - | - | - | - | - | - |
| | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN, PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pengertian Pembangunan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Pembangunan Nasional meliputi pembangunan pusat dan daerah. Sedangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga dari periode RPJMD Kabupaten Rote Ndao tahun 2019 - 2024, oleh sebab itu arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao mengacu pada RPJMD untuk tujuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat menjabarkan dan mensinkronisasi kebijakan yang telah digariskan secara regional dan nasional.

Adanya Paket Kebijakan Ekonomi (I s/d XVI) yang ditetapkan Pemerintah mendorong minat para investor untuk berinvestasi di Indonesia (karena adanya kemudahan perijinan dan lain sebagainya seperti pemangkasan terhadap peraturan daerah yang menghambat kegiatan investasi, percepatan pelaksanaan berusaha (amanat Perpres Nomor 91 Tahun 2017) serta penerapan pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik *Online Single Submission (OSS)*).

Selain itu secara teknis, dalam Rencana Strategis BKPM Republik Indonesia, ada 7 (tujuh) Arah Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Tahun 2019 – 2024 (Kebijakan BKPM RI) , yaitu 1) Perbaikan iklim penanaman modal; 2) Mendorong persebaran penanaman modal; 3) Pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; 4) Penanaman modal yang berwawasan lingkungan; 5) Pemberdayaan UMKMK; 6) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif; 7) Promosi penanaman modal.

Sasaran yang ingin dicapai yaitu adanya lompatan percepatan pelayanan perizinan investasi dengan harmonisasi dan reformasi serta memangkas berbagai regulasi yang menghambat pelayanan dan kegiatan investasi; peningkatan jumlah investor (PMA dan PMDN) yang berinvestasi di Indonesia, peningkatan nilai realisasi investasi, perbaikan

peringkat nilai Daya Saing dan Kemudahan Berusaha Indonesia dengan Negara-negara lain dan peningkatan nilai daya saing antar daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia termasuk daya saing inovasi dalam pelayanan perizinan daerah.

Secara umum, kebijakan pembangunan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang dicanangkan pemerintah pusat mengacu pada 9 agenda prioritas pembangunan nasional (Nawa Cita), dimana termasuk dalam agenda :

C2. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.2.1. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengembangan potensi unggulan daerah dan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdaya saing, terintegrasi dan terkoordinasi .
- 2) Adanya penyebaran data dan informasi potensi dan peluang investasi melalui berbagai kegiatan promosi yang menarik minat para investor menanamkan modalnya di Kabupaten Rote Ndao.
- 3) Meningkatkan pendapatan dan perolehan nilai tambah serta produktivitas usaha bagi usaha kecil dan masyarakat.
- 4) Mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan yang berkualitas, efektif dan efisien.
- 5) Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing melalui peningkatan pengendalian (pembinaan, pemantuan dan pengawasan) pelaksanaan penanaman modal.

3.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan ukuran spesifik yang menjelaskan sejauhmana tujuan tersebut dicapai dalam 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam pencapaian tujuan tersebut di atas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menetapkan sasaran yang hendak dicapai yaitu :

1. Mengembangkan system data dan informasi potensi dan peluang investasi yang terinci dan akurat.
2. Pengembangan potensi unggulan daerah yang bernilai investasi.
3. Meningkatnya efektivitas promosi investasi di Bidang Penanaman Modal.
4. Terwujudnya kemitraan investasi antara investor dengan UMKM.
5. Meningkatnya jumlah penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan investasi.
6. Terwujudnya kepuasan layanan publik.
7. Meningkatnya SDM aparatur yang memiliki kemampuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu.
8. Meningkatnya nilai realisasi investasi dan jumlah investor.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang mempunyai Tugas pokok” **Membantu Bupati dalam menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**” sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 03 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabuapten Rote Ndao.

Dari hasil analisis yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh rencana Program/ Kegiatan dan Pendanaan Indikatif untuk tahun 2024 sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 5

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun 2024 dan Prakiraan Maju tahun 2025 Kabupaten Rote Ndao

OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

| KODE REKENING | | | | | KE | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | INDIKATOR | Rencana Tahun 2024 | | | | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | |
|---------------|----|----|------|--|-----|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif | Sum ber Dana | | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | BAA | | | | | | |
| 2 | 18 | | | | | PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 01 | | | A | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | MENINGKATNYA LAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | | 100% | 1.980.764.963 | | | 100% | 2.431.197.780 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | | A.1 | Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | BAA | 19 Dokumen | 45.040.000 | APB D II | | 19 Dokumen | 77.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--------------|----|------------------------------------|--|--|------------|------------------------|----------------------|-----------------|--|------------------------|----------------------|
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 01 | A.1.1, A.1.2, A.1.3 | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Tersusunnya dokumen Perubahan Renstra, Renja-PD-PD, Perubahan Penja PD, Profil OPD, RKT, Perjanjian Kinerja, Perubahan PK, Rencana Aksi Kinerja, RKA PD, Perubahan RKA PD, DPA SKPD dan Perubahan DPA PD | BAA | 12 Dokumen | 30.170.000 | APB D II | | 12 Dokumen | 55.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.01 | 05 | A.1.3 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Tersusunnya dokumen LKIP, LKPJ, LPPD dan evaluasi renja per triwulan | BAA | 7 dokumen | 14.870.000 | APB D II | | 7 dokumen | 22.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | | A.2. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | BAA | 22 Orang/ Bulan | 1.786.708.463 | APB D II | | 22 Orang/ Bulan | 2.178.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 01 | A.2.1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | BAA | 22 Orang/ Bulan | 1.720.408.463 | APB D II | | 22 Orang/ Bulan | 2.090.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.02 | 03 | A.3.4 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Tersedianya Honor Pengelola APBD | BAA | 6 Orang | 66.300.000 | APB D II | | 6 Orang | 88.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | | A.3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | BAA | | 4.200.000 | | | | 4.200.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.03 | 02 | A.3.4 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD | Tersedianya honor Pengelola BMD SKPD | BAA | 1 Orang | 4.200.000 | APB D II | | 1 Orang | 4.200.000 |
| | 18 | 01 | 02.05 | | A.5 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Tersedianya administrasi Kepegawaian Daerah | BAA | 6 Orang | 0 | APB D II | | 6 Orang | 110.000.000 |
| | | 01 | 02.05 | 03 | | Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Tersedianya administrasi Kepegawaian Daerah | BAA | 6 Orang | 0 | APB D II | | 6 Orang | 82.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|----|------|----|--------|---|---|-----------------|-----------------------|------------|----------|--|-----------------------|-------------|
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | | A.3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah | BAA | 100% | 77.969.000 | APB D II | | 100% | 391.600.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 01 | A.3.9 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | BAA | 1 Paket | 500.000 | APB D II | | 1 Unit | 1.100.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 02 | A.3.10 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (2 Unit Laptop, 2 Printer) | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor (4 Bh Laptop, dan 2 Buah Printer) | BAA | 1 paket | 2.300.000 | APB D II | | 6 unit | - |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 07 | A.3.5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor | BAA | 12 Bulan | 5.472.000 | APB D II | | 12 Bulan | 2.200.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 05 | A.3.8 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan | BAA | 96/31.980 Buku/Lembar | 5.200.000 | APB D II | | 96/31.980 Buku/Lembar | 16.500.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.06 | 09 | A.3.12 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Luar Provinsi | Dlm & Luar Prop | 12 kali | 64.682.500 | APB D II | | 15 kali | 275.000.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | | A.3 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BAA | 12 Bulan | 24.682.500 | APB D II | | 12 Bulan | 30.800.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.08 | 02 | A.3.2 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terlaksananya Pembayaran Rekening Telepon/Internet, Listrik dan Air | BAA | 12 Bulan | 24.682.500 | APB D II | | 12 Bulan | 29.150.000 |
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | | A.3 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | BAA | 100% | 42.165.000 | APB D II | | 100% | 88.000.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|-----------------|--|--|------------|--------------------------|-------------------|----------|--|--------------------------|--------------------|
| 2 | 18 | 01 | 2.09 | 02 | A.3.3 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (1 Unit Roda 4 dan 5 Unit Roda 2) | Telaksananya pembayaran pajak kendaraan dinas operasional | BAA | 4 Unit | 42.165.000 | APB D II | | 4 Unit | 2.750.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | - |
| 2 | | | | | | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | - |
| 2 | 18 | | | | A,B,C, D | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 2 | 18 | 03 | | | C | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | TERLAKSANANYA PROMOSI MELALUI KEIKUTSERTAAN DALAM PAMERAN INVESTASI | | 1 KALI DAN 40 UKM | 60.236.000 | | | 3 KALI DAN 40 UKM | 66.000.000 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | | C.1 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi | | - | 60.236.000 | - | | - | 66.000.000 |
| 2 | 18 | 03 | 2.01 | 02 | C.1.1 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Terlaksananya Promosi melalui keikutsertaan dalam pameran investasi | kupang | 1 kali | 60.236.000 | | | 1 kali | 33.000.000 |
| 2 | 18 | 04 | | | E | PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL | MENINGKATNYA TRANSPARANSI PELAYANAN PERIJINAN | | 1300 PERIJINAN | 51.440.000 | | | 1300 PERIJINAN | 742.500.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------|----|--------------|---|---|-----------|------------------------|--------------------|--|--|-------------------|--------------------|
| 2 | 18 | 04 | 2.01 | 02 | E.1.2 | Pemantauan , analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis resiko | Jumlah kegiatan usaha yang mendapat Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha | Rote Ndao | 500 Kegiatan Usaha | 51.440.000 | | | 500 Ijin | 192.500.000 |
| 2 | 18 | 05 | | | D | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | MENINGKATKAN KETAATAN BERINVESTASI | | 74 Pelaku Usaha | 542.600.000 | | | 7 INVESTOR | 596.860.000 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | | D.1 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Rote Ndao | 74 Pelaku Usaha | 0 | | | 60 PMA/PM DN | 542.600.000 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 02 | D.1.1 | Bimbinga Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah pelaku usaha yang mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko | Rote Ndao | 74 Pelaku Usaha | 0 | | | 60 PMA/PM DN | 289.294.500 |
| 2 | 18 | 05 | 2.01 | 03 | D.1.1 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari pelaku usaha yang telah Dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi | Rote Ndao | 74 Pelaku Usaha | 0 | | | 60 PMA/PM DN | 279.605.000 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|
| | | | | | | | Lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizin berusaha | | | | | | | |
| | | | | | | | TOTAL | | | 2.092.440.963 | | | | 4.500.760.000 |

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao yang berisi program dan kegiatan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis, dapat lebih terkoordinasi, terakomodasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, selanjutnya Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao ini dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) dan APBD.

Implementasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rote Ndao Tahun 2024 sangat mengharapkan adanya koordinasi lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan sehingga lebih merata dan terarah yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Rencana Kerja Tahunan ini dibuat untuk di jadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan sekaligus memudahkan berbagai *stakeholder* dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi.

Baa, 17 Juli 2023
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Rote Ndao,



Daud D. Bessie, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 196908111998011002